

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan yang selalu menjadi fokus perhatian pemerintah di berbagai negara di seluruh dunia. Kemiskinan bahkan menjadi persoalan fenomenal dalam bidang ekonomi yang dijadikan titik acuan keberhasilan pemerintah dari waktu ke waktu, terutama di negara-negara berkembang (Tobing et al., 2023). Secara sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan di mana seseorang tidak memiliki cukup uang atau barang-barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Sementara itu, dalam arti lebih luas, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang, keluarga, komunitas atau negara untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan akses sosial ekonomi lainnya (Adriani & Wahyudi, 2015).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensi, bahkan kemiskinan dapat menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan saat ini menjadi tantangan global terbesar yang dihadapi dunia (Arsyad, 2010). Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara kompherensif mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Penanggulangan Kemiskinan juga harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan setiap daerah, serta merupakan agenda utama dalam pembangunan berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang

bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun (*end poverty in all its forms*) (Innovillage, 2022).

Sebagai negara berkembang, Indonesia menyadari pentingnya perhatian terhadap masalah kemiskinan dan berupaya untuk menekannya dalam agenda tahunan pemerintah. Bahkan, penanggulangan kemiskinan menjadi bagian dari *masterplan* dalam perencanaan pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan (Pasaribu, 2024). Oleh karena itu, untuk mencapai perubahan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, pembangunan harus dilakukan dengan fokus yang serius.

Sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap persoalan kemiskinan, hal ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Melalui regulasi teknis upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui kebijakan dan program pemerintah serta pemerintah daerah yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha serta masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sebagai bagian dari upaya ini, dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan tujuan untuk memperbaiki sasaran program berbasis rumah tangga dan wilayah serta memperbaiki mekanisme panyaluran program.

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut, dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelaras Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut di tingkat Provinsi, Pemerintah Provinsi Jambi membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 176/Kep.Gub/Bappeda-3/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2024.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang masih dihadapi Indonesia, meskipun angka kemiskinan nasional terus menunjukkan penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 9,1% yang berarti hampir 25 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun angka ini menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ketimpangan ekonomi antara wilayah masih sangat terasa, terutama antara Jawa dan Luar Jawa, dengan Pulau Sumatera menjadi salah satu pulau yang masih menghadapi tantangan besar dalam penanggulangan kemiskinan.

Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang terdiri dari 10 provinsi, memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi Indonesia, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, perikanan, pariwisata dan sumber daya alam. Namun, meskipun kaya akan potensi alam,

Sumatera juga menghadapi tantangan serius dalam hal pemerataan pembangunan. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Sumatera cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pulau Jawa. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Sumatera tercatat 10,3% yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata nasional.

Tabel 1.1 Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi se-Sumatera Tahun 2023

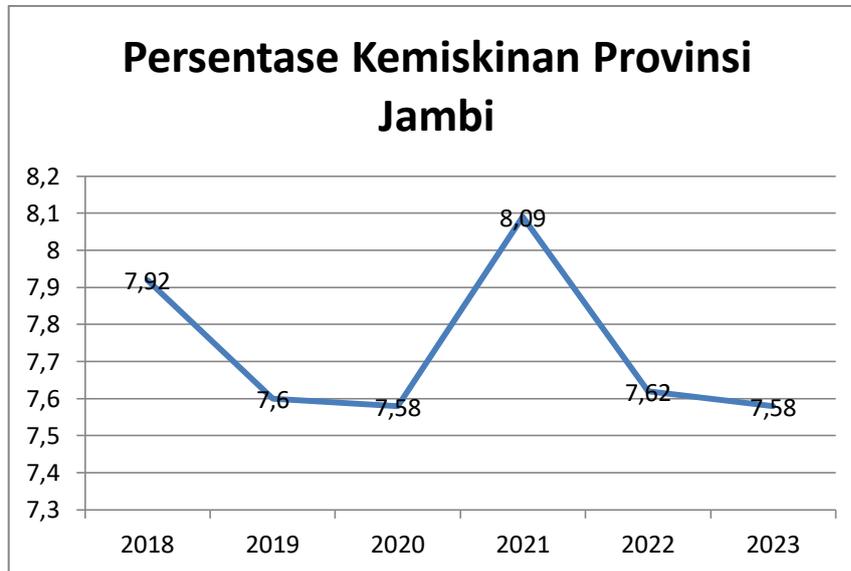
No	Provinsi	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)
1	Aceh	14,45
2	Bengkulu	14,04
3	Sumatera Selatan	11,78
4	Lampung	11,11
5	Jambi	7,58
6	Riau	6,68
7	Sumatera Utara	8,15
8	Sumatera Barat	5,95
9	Kepulauan Riau	5,69
10	Bangka Belitung	4,52
INDONESIA		9,36

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa persentase tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera menunjukkan kemiskinan bervariasi antar provinsi. Beberapa provinsi di Sumatera masih mencatatkan angka kemiskinan yang relatif tinggi

seperti, Aceh dengan 14,45% merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Diikuti oleh Bengkulu yang mencapai 14,04%, Sumatera Selatan dengan 11,78% dan Lampung 11,11%. Sementara itu, Sumatera Utara memiliki tingkat kemiskinan 8,15%, Riau sebesar 6,68% dan Provinsi Jambi sebesar 7,58%. Dan adapun provinsi lainnya tercatat memiliki tingkat kemiskinan yang relative lebih rendah, yaitu Bangka Belitung 4,52%, Sumatera Barat 5,95% dan Kepulauan Riau tercatat 5,69%.

Provinsi Jambi dengan tingkat kemiskinan 7,58%, memiliki tingkat kemiskinan yang berada di bawah rata-rata nasional dan beberapa provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Meskipun demikian, provinsi ini masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi angka kemiskinan lebih lanjut. Sebagai provinsi yang mengupayakan laju penurunan tingkat kemiskinan dan menerapkan berbagai kebijakan dan program-program yang memprioritaskan penurunan tingkat kemiskinan. Namun, masalah kemiskinan tetap menjadi isu signifikan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya (Lega & Beriansyah, 2022). Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi kemiskinan di wilayah ini, berikut merupakan data persentase penduduk miskin (persen) di Provinsi Jambi dari tahun 2018 hingga 2023, yang ditunjukkan pada grafik dibawah ini:

Grafik 1.1 Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi 2018-2023

Sumber :Capaian Indikator Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, 2024

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2018-2023) dan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Pada tahun 2018, persentase kemiskinan mencapai 7,92%, kemudian mengalami penurunan menjadi 7,6% pada tahun 2019 dan 7,58% pada tahun 2020, dan kemudian, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2021 di mana persentase kemiskinan meningkat menjadi 8,09%. Lonjakan ini dipengaruhi oleh pandemic COVID-19 yang melanda seluruh dunia, menyebabkan stagnansi dalam banyak sektor ekonomi, yang berkontribusi pada peningkatan tingkat kemiskinan. Selama dua tahun terakhir, yakni tahun 2022 hingga 2023, terdapat tren penurunan yang disebabkan oleh pemulihan pasca-pandemi. Meskipun demikian, penurunan tersebut tidak signifikan, dengan persentase kemiskinan yang masih stabil pada angka sekitar 7% dari total populasi sebanyak 3.760.275 jiwa. Angka ini masih

tergolong besar jika di bandingkan dengan target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu 5,35% dan berisiko untuk berpotensi meningkat ketingkat kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan data pada grafik, menunjukkan bahwa dalam enam tahun terakhir, upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam menurunkan tingkat kemiskinan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tidak mengalami penurunan yang berarti. Padahal, Provinsi Jambi dikenal sebagai salah satu provinsi yang secara intens dan fokus melaksanakan berbagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui Program “Dua Miliar Satu Kecamatan” atau Dumisake yang menjadi unggulan Pemerintah Provinsi Jambi yang merupakan aksi dan strategi dalam mengentaskan kemiskinan. Namun, program ini hanya sebatas semboyan dan belum terealisasi hingga APBD semester pertama TA 2022 (Berita Jambi.co, 2022).

Program bedah rumah yang dilaksanakan secara umum belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya, program dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah sejauh ini belum menghasilkan dampak yang signifikan dalam penanggulangan kemiskinan (Saputra, 2022). Tingginya angka kemiskinan di provinsi Jambi disebabkan oleh berbagai faktor ketimpangan, diantaranya masih lemahnya komitmen penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta ketidaktepatan sasaran dari program-program penanggulangan kemiskinan yang telah diterapkan. Hal Ini menunjukkan bahwa

perencanaan penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah diupayakan oleh pemerintah Provinsi belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaannya (Fikri et al., 2015).

Dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan, salah satu aspek penting adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Dengan data yang tersedia, pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk penanggulangan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung penanggulangan kemiskinan adalah menempatkan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen strategis kebijakan di daerah yaitu Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD).

Dalam hal ini, pemerintah daerah memegang peran penting sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana di tingkat lokal dapat berandil besar dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan SDGs, terutama dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi fokus utama di seluruh wilayah. Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) memiliki peran sangat sentral dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk peran strategis dalam penurunan tingkat kemiskinan. Sejalan dengan regulasi tentang Bappeda dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 yang menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur Jambi dalam menentukan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan tugas ini tentunya memegang peranan penting sebagai acuan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan secara efektif. Dalam konteks ini, stabilitas angka kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jambi selama 6 tahun terakhir telah menimbulkan berbagai pertanyaan serta sorotan terhadap kinerja lembaga yang terlibat dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan. Dalam mengatasi tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jambi memerlukan kebijakan terpadu dan tepat sasaran di wilayah tersebut (Suripto. & Dyah, 2023). Kemampuan lembaga dalam merencanakan, melaksanakan dan menangani permasalahan kemiskinan sangat mempengaruhi target yang ditetapkan. Dengan kata lain, kapabilitas lembaga dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan faktor kunci yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi.

Kapabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat dituntut dalam hal ini, kapabilitas merupakan bentuk dari kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah dalam menghadapi tantangan dan masalah (Syarifah et al., 2020). Pemerintah sebagai lembaga yang berperan menjadi koordinator dalam perencanaan penurunan angka kemiskinan, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, sebagai lembaga pelaksana perencanaan kebijakan, program, dan strategi di wilayah Provinsi Jambi, belum berhasil mengentaskan kemiskinan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan sebuah kapabilitas yang baik dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Peneliti menemukan berbagai karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini melalui penelusuran penelitian sebelumnya. Kajian Ilmiah mengenai

kemiskinan telah banyak dilakukan, penelitian ini menggunakan delapan *literature review* yang relevan dengan topik penelitian saya yang berjudul “Kapabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dalam Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jambi”.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Lega & Beriansyah, 2022), diketahui bahwa kemiskinan masih merupakan masalah yang signifikan di Provinsi Jambi. Data mengindikasikan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi masih teridentifikasi pada masalah kemiskinan, meski dalam periode tertentu mengalami tren penurunan. Meski demikian, masalah-masalah seperti keterbatasan sumber daya, ketimpangan regional, dan ketidakadilan gender masih menjadi tantangan yang di hadapi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Falianto, 2020), yang menggarisbawahi masalah kemiskinan di Provinsi Jambi sejalan dengan tantangan nasional, dan memerlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan secara efektif. Dan kemudian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi periode 2004-2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Yolanda Sari dan Antony Falianto sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jannah et al., 2023), dimana dari hasil penelitian pada tahun 2017-2021 pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jambi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Nurafni et al., 2021), dimana dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi adalah faktor kunci dalam menurunkan kemiskinan, dengan hubungan kuat antara program pengentasan kemiskinan dan penurunan kemiskinan. Kemudian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sudirman & Sakinah, 2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah penduduk produktif, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tenaga kerja berperan penting dalam meminimalkan kemiskinan, dengan pengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di daerah tersebut. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Daniel et al., 2021), tidak sejalan dengan keempat penelitian di atas, dimana dari hasil penelitian diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dan IPM memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan, jumlah penduduk produktif justru meningkatkan kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah dan angkatan kerja tidak signifikan dalam pengaruhnya

Di luar Provinsi Jambi, Penelitian yang dilakukan (Hariadi, 2024), menilai bahwa Kolaborasi antar perangkat daerah di Aceh Tamiang dalam pengentasan kemiskinan sudah baik namun belum optimal, kekurangan dana dan sumber daya masih menjadi hambatan. Dan di Kabupaten Malang, meskipun terdapat strategi dan misi pengentasan kemiskinan dalam dokumen perencanaan, kolaborasi masih terbatas pada tingkat horizontal tanpa koalisi khusus (Yunita et al., 2023).

Berdasarkan *literature review* yang digunakan dalam penelitian ini terdapat beberapa fokus kajiannya. Yang pertama, fokus pada analisis tingkat kemiskinan. Kedua, fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi, pendidikan, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, tenaga kerja, dan pengangguran. Dan ketiga, fokus pada kolaborasi antar

perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada kapabilitas lembaga dalam proses perencanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini berposisi untuk memberikan perspektif baru yang belum dibahas dalam studi-studi sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kapabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi. Dengan mengusung judul penelitian “**Kapabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dalam Perencanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jambi**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka peneliti merumuskan rumusan masalah dengan : Bagaimana Kapabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perencanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kapabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perencanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan Kapabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perencanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jambi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan dan perencanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat merencanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan memperkuat dasar teoritis yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi untuk mahasiswa dan digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan, dan memberikan informasi tambahan bagi pihak-pihak yang memiliki permasalahan yang sama ataupun hendak mengadakan penelitian yang lebih lanjut.

1.5 Landasan Teori

1. Kapabilitas Organisasi

Kapabilitas merupakan kemampuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik itu dalam individu maupun dalam konteks organisasi, serta potensi individu untuk melakukan berbagai aktivitas tertentu (Amir, 2011). Sampurno (2011) menjelaskan bahwa kapabilitas

organisasi merujuk pada kemampuan organisasi dalam memposisikan dan memanfaatkan sumber daya guna mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Kapabilitas organisasi membutuhkan berbagai keahlian individual yang diintegrasikan dengan teknologi, peralatan dan berbagai sumber daya lainnya (Aisyah & Purwanda, 2019). Kapabilitas organisasi adalah salah satu sumber daya yang sulit dialihkan karena didasarkan pada sumber daya yang bersifat tim bukan individu.

Kapabilitas pada dasarnya mencerminkan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Baik berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*) untuk menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa. Kapabilitas tersebut muncul ketika sumber daya itu telah terintegrasi dengan baik sesuai dengan tujuannya, untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, atau serangkaian tugas yang diinginkan. Dengan demikian, kapabilitas menggambarkan kemampuan suatu organisasi untuk mengoptimalkan atau mengeksplorasi sumber dayanya.

Menurut Amit dan Schoemaker dalam (Kusumasari Bevaola, 2014), kapabilitas organisasi merupakan kemampuan organisasi untuk menggerakkan sumber daya dan menggunakan proses organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi ini mencakup dua karakteristik utama. Pertama, kapabilitas adalah atribut dari sebuah organisasi yang memungkinkannya untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk menerapkan strategi. Kedua, tujuan utama dari kapabilitas adalah untuk

meningkatkan produktivitas sumber daya lain yang dimiliki organisasi. Hal ini mengacu pada sumber daya keuangan, fisik, individu dan sumber daya organisasi.

Kemampuan organisasi didefinisikan sebagai elemen kunci dalam pembangkitan dan pengembangan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Barney dalam (Kusumasari Bevaola, 2014) mengindikasikan bahwa kemampuan (kapabilitas) mungkin menjadi masalah struktural yang paling signifikan dalam pengelolaan organisasi yang kompleks saat ini. Menurut Leonard Barton dalam (Kusumasari Bevaola, 2014), mengasumsikan bahwa penggambaran kemampuan sebagai sesuatu yang unik, khas, sulit untuk ditiru, atau unggul dalam kompetisi sudah cukup jelas, terutama ketika melibatkan penempatan sumber daya atau keterampilan.

Kapabilitas tidak hanya menunjukkan satu sumber daya saja, tetapi juga menunjukkan pada berbagai sumber daya lain seperti asset, keuangan, teknologi atau tenaga kerja. Namun, kapabilitas adalah metode yang khas dan unggul dalam mengalokasikan sumber daya. Kapabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki, seseorang ataupun instansi baik secara kualitas maupun kuantitas (Sanjaya & Rudiawan, 2018). Kapabilitas atau kemampuan sangat penting dimiliki oleh organisasi untuk berubah dan mengembangkan prasyarat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Hal ini karena kemampuan dianggap sebagai salah satu

faktor utama dalam pembangkitan dan pengembangan organisasi di tengah ketidakpastian dan perubahan lingkungan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli, bahwa kapabilitas organisasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk mengintegrasikan dan mengeksplorasi semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan, termasuk sumber daya manusia, keuangan, kelembagaan dan lain-lain. Suatu organisasi tidak dapat mencapai kapasitasnya hanya dengan menggunakan satu jenis sumber daya tanpa dukungan dari sumber daya lainnya.

Menurut Kusumasari Bevaola (2014), sumber daya dan faktor penting yang dimiliki oleh pemerintah untuk menciptakan organisasi yang berkemampuan baik antara lain:

1. Kelembagaan

Kapabilitas kelembagaan diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh sebuah organisasi yang memiliki pengaturan kelembagaan yang jelas untuk mencapai tujuan secara efektif. Hal ini tercermin melalui adanya struktur organisasi yang terorganisir dengan baik serta kemampuan untuk menjalin hubungan dengan berbagai stakeholder. Aspek dalam pengendalian kelembagaan yang efektif diharapkan mampu menghasilkan tingkat kapabilitas kelembagaan yang dinilai optimal. Dimensi indikator kelembagaan meliputi: memiliki struktur organisasi yang tertata dan sistematis, terdapat peran, tugas dan tanggung jawab yang jelas dari setiap posisi atau jabatan

yang ada didalamnya serta mampu menjalin hubungan dengan semua level pemerintah.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi memiliki arti penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan atau program. Keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan sesuai dengan apa yang dikerjakan akan berdampak langsung kepada keberhasilan pelaksanaan sebuah program. Oleh sebab itu, Kusumasari mengungkapkan bahwa indikator penting dalam kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi mencakup memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian tugas dan pekerjaan yang jelas.

3. Implementasi Kebijakan

Indikator dalam implementasi kebijakan adalah tersedianya undang-undang, kebijakan dan peraturan baik pusat maupun daerah sebagai landasan pengambilan keputusan, menjalin hubungan dengan institusi lainnya serta untuk memobilisasi sumber daya. Peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan harus ada sebagai landasan hukum. Keberadaan peraturan dan kebijakan terkait perencanaan penanggulangan kemiskinan harus bersumber dari undang-undang, kebijakan, dan peraturan baik pusat maupun daerah.

4. Keuangan

Indikator penting dalam kapabilitas adalah keuangan. Hal tersebut dilihat dari memiliki dukungan keuangan yang mencukupi untuk mendukung

segala aktivitas dalam perencanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Indikator analisis pengukuran yaitu terkait ketersediaan sumber daya keuangan.

5. Teknis

Memiliki sistem logistik manajemen dan pemanfaatan sistem teknologi dan informasi yang efektif untuk dapat berkomunikasi dan menjalin *network* dengan berbagai *stakeholder*. Hal ini berhubungan dengan terkait ketersediaan sistem logistik manajemen yang berbentuk sumber daya teknologi operasional dan penyediaan sarana dan prasarana untuk membantu operasional organisasi dalam mencapai tujuannya.

Peneliti menggunakan teori Kapabilitas menurut Bevaola Kusumasari dengan alasan bahwa indikator-indikator kapabilitas menurut Kusumasari dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Indikator-indikator tersebut meliputi: Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Implementasi Kebijakan, Keuangan dan Teknis.

2. Perencanaan Pembangunan

Menurut (Abe, 2002) Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti skema atau susunan dari apa yang akan dikerjakan. Dari definisi sederhana ini, dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan) dan waktu (kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan

demikian, perencanaan dapat dipahami sebagai sebuah respon (reaksi) terhadap masa depan (Rina Nur Azizah & Nurhaliza Fardayanti, 2021).

Fungsi perencanaan adalah sebagai usaha sistematis untuk mempersiapkan berbagai kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan melibatkan perumusan tujuan prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya, serta mencakup ramalan tentang kondisi dimasa akan datang dan estimasi dampak dari perencanaan terhadap kondisi tersebut. Rencana pembangunan juga sebaiknya dapat menumbuhkan solidaritas nasional dan solidaritas sosial, serta mendorong keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab bersama.

Jadi sebelum melaksanakan suatu kegiatan, penting untuk merencanakannya terlebih dahulu karena perencanaan akan berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan. Dengan adanya sebuah perencanaan, kegiatan akan berjalan secara struktural yang akan mempermudah tercapainya tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan.

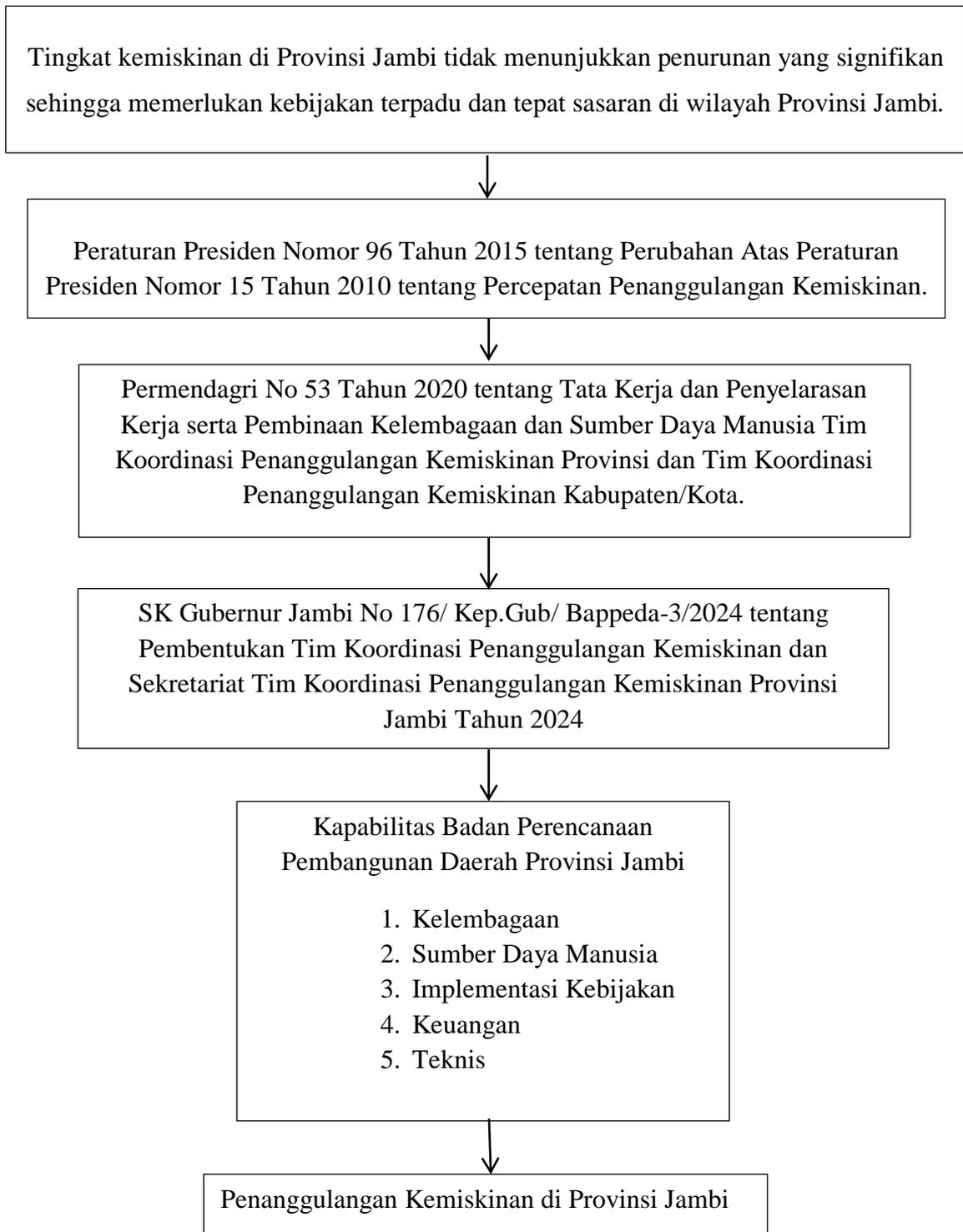
Pembangunan adalah sebuah proses yang mengarah pada pencapaian tujuan negara. Pembangunan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait dan pembangunan tidak dapat berjalan secara otomatis begitu saja, melainkan melalui suatu proses yang dikenal sebagai perencanaan pembangunan, di mana peran pemerintah sangat dominan, terutama dalam proses perencanaan. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Simarmata & Syahputra, 2024).

Suatu perencanaan pembangunan merupakan langkah awal dalam proses pembangunan. Sebagai langkah awal, perencanaan pembangunan ini berperan sebagai acuan atau pedoman dasar untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kegiatan yang tidak mudah karena menghadapi berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif meliputi berbagai aspek sosial masyarakat dari suatu keadaan yang ada dalam wilayah terkait. Sehingga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya, penting untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi, sehingga efisiensi dan efektifitas dapat dicapai. Monitoring dan evaluasi merupakan fungsi manajemen yang saling berkaitan. Dalam praktiknya, monitoring sering diartikan sebagai pengawasan, pengendalian, atau pemantauan terhadap aktivitas atau kegiatan yang sedang berlangsung, sementara evaluasi diartikan sebagai penilaian terhadap suatu hasil aktivitas yang telah dilaksanakan. Dalam perumusan perencanaan pembangunan bahwa kegagalan proses perencanaan diakibatkan oleh beberapa masalah khusus tertentu, yaitu :

- a. Keterbatasan penyusunan rencana dan pelaksanaannya.
- b. Data-data yang tidak memadai dan tidak handal.
- c. Gejolak ekonomi eksternal dan internal yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya.
- d. Kelemahan kelembagaan.
- e. Kurangnya kemauan politik (Todaro, 2000).

1.6 Kerangka Pikir

Gambar 1.6 Kerangka Pikir



Sumber : diolah peneliti

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dikenal dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya diartikan sebagai suatu prosedur penelitian yang membentuk data deskriptif dilaksanakan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode kualitatif melibatkan penggunaan kata-kata tertulis dan lisan dari perilaku dan perilaku yang diamati (L. Moleong, 2002).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*Case Study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk tetap holistik dan signifikan. Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus ini bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, menjelaskan dan memberikan pemahaman yang lebih mendetail tentang permasalahan yang akan diteliti yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perencanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jambi.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti memperoleh informasi dan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi. Lokasi tersebut dipilih didasarkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang memiliki tanggung jawab dan wewenang atas perencanaan

kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan penelitian yang telah dirancang, fokus penelitian akan difokuskan pada bagaimana Kapabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dalam merencanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Dalam proses penelitian ini, sumber data yang digunakan meliputi:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh oleh pengumpul data (Sugiyono, 2022). Peneliti mengumpulkan data secara langsung sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data secara langsung melalui mencatat kejadian/ peristiwa, *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pengumpul data secara tidak langsung, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Sumber

data sekunder berfungsi sebagai pelengkap untuk menambah informasi yang diperoleh dari data primer. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti bahan dokumentasi laporan dokumen-dokumen, buku referensi, jurnal, studi kepustakaan, sumber internet dan lain-lain yang dibutuhkan peneliti untuk melengkapai data yang ada (L. J. Moleong, 2019).

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian merujuk pada individu yang mampu memberikan informasi mengenai situasi maupun kondisi yang relevan dengan latar belakang penelitian dan yang memiliki pemahaman yang baik mengenai topik penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel data yang didasarkan pada pertimbangan dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2013).

Informan dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang topik yang sedang diteliti, berdasarkan pertimbangan bahwa mereka adalah pihak yang paling memahami informasi penelitian terkait penelitian. Informan yang peneliti butuhkan terkait objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
- b. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi
- c. Kepala Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Jambi.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian dan memiliki strategi yang beragam. Menurut Creswell, teknik pengumpulan data dalam penelitian melibatkan prosedur dan teknik seperti, wawancara, dokumentasi serta audiovisual (Wahyuningsih, 2013). Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti pilih:

a. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara dua individu yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab lisan, sehingga memungkinkan penyampaian makna terkait dengan suatu topik tertentu. Wawancara analisis kualitatif bersifat komprehensif dan mereka ingin pengetahuan dieksplorasi secara holistik dan langsung dari informasi. Selain itu, kegiatan wawancara merupakan strategi pengumpulan data menggunakan wawancara tatap muka dengan peserta (Creswell, 2016).

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang menuntut peneliti untuk langsung turun ke lapangan mengamati berbagai hal terkait, seperti ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Pengamatan secara langsung atau implisit dari objek atau tindakan yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan

langsung di lapangan mengenai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perencanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jambi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting yang dimiliki oleh lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi penelitian merupakan tindakan peneliti dalam mengambil foto atau rekaman lainnya sebagai bentuk penguatan terhadap temuan yang diperoleh dalam penelitian (Hamidi, 2004). Dokumentasi ini bisa berupa dokumen publik (misalnya, buku harian, jurnal, diary, surat dan e-mail). Ini menjadi pendukung dalam penelitian (Creswell, 2016).

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses aktivitas mengolah data dengan menilai-nilai dan menyatukan data kedalam sebuah sistematika menjadi satu sehingga dapat dirumuskan dan ditemukan sebuah kesimpulan untuk dapat dipresentasikan kepada semua pihak (Sandu Siyoto & Sodik, 2015). Proses ini mencakup mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusunnya ke dalam pola, menentukan mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2022).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dilapangan dengan konsep dari Miles dan Huberman. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung, dan setelah

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas analisis dapat berlangsung secara interaktif dan terus menerus selama pengumpulan data, sehingga data menjadi jenuh (Huberman, 1992).

Dalam analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) terdapat empat alur yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara dan dokumentasi atau kombinasi dari ketiganya (triangulasi). Proses pengumpulan data ini dapat berlangsung selama sehari-hari, bahkan berbulan-bulan, sehingga data yang didapatkan akan sangat berlimpah. Pada tahap awal, peneliti melakukan eksplorasi menyeluruh terhadap situasi sosial atau obyek penelitian, mencatat segala hal yang diamati dan didengar, dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang sangat banyak dan beragam.

b. Reduksi data

Reduksi data didefinisikan sebagai proses yang melibatkan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang penting yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan identifikasi tema dan pola yang muncul dari data, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan langkah pengumpulan data selanjutnya. Dalam melakukan reduksi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu,

proses ini juga merupakan refleksi dari pemikiran kritis yang membutuhkan kecerdasan dan pemahaman yang mendalam.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai format, seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya. Namun, yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks naratif. Dengan cara penyajian data ini, data menjadi terstruktur dan tersusun dengan baik sehingga lebih mudah dipahami.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dalam proses analisis penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merujuk pada temuan baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran mengenai suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Proses menarik kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Selain itu, kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

1.7.8 Keabsahan Data

Teknik triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk menguji kevalidan data atau kebenaran dari data yang diperoleh dari penelitian dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda. Triangulasi dapat didefinisikan sebagai teknik dalam pengumpulan data yang bersifat mengabungkan dari berbagai macam teknik untuk proses pengumpulan data dari sumber yang telah ada. Dalam proses ini, Peneliti berusaha mengumpulkan data sekaligus memverifikasi kredibilitasnya dengan mengecek keabsahan informasi melalui sumber yang berbeda. Terdapat beberapa jenis tipe triangulasi yaitu:

- a. Triangulasi sumber, adalah metode untuk menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Data yang terkumpul kemudian dideskripsikan dan dikelompokkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan memilih data yang memiliki kesamaan dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih mendalam.
- b. Triangulasi teknik, pengujian yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya melakukan wawancara atau dokumentasi. Apabila ditemukan perbedaan hasil, peneliti akan melakukan konfirmasi data kepada sumber data untuk memastikan keakuratannya (Sugiyono, 2013).